

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan (SARA) yang menjadikan kekayaan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia. Tetapi, dengan itu ada dampak negatif yang dapat menjadikan konflik antar budaya. Penyebab terjadinya konflik di Indonesia, seperti keberadaan non-pribumi versus pribumi, konflik agama, khususnya agama Islam dan agama Kristen dan isu kesukuan khususnya dominasi Jawa dalam sejarah politik di Indonesia. Terjadinya konflik atas dasar isu-isu karena kesenjangan ekonomi politik yang terjadi seperti kekayaan non-pribumi atas pribumi, kekayaan minoritas Kristen atas mayoritas umat Islam, dan dominasi suku Jawa atas non Jawa dalam pentas politik. Terdapat banyak konflik permasalahan dalam hubungan etnik di Indonesia yang berujung kepada konflik, seperti isu pribumi (Indonesia asli) dengan non-pribumi (China keturunan), dan isu agama (Tajuddin & Sani, 2016).

Istilah dari pribumi muncul pada masa kolonial Hindia Belanda dalam undang-undang Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan Kolonial Belanda yaitu beragam kelompok penduduk asli di Nusantara sebagai bentuk diskriminasi sosial. Pada masa kolonial Belanda adanya segregasi (pemisahan) rasial dalam tiga tingkat : ras kelas pertama adalah *Europeanen* (Eropa kulit putih), ras kelas kedua adalah

Vreemde Oosterlingen (Timur asing) yang terdiri dari orang Tionghoa, Arab, India maupun non-eropa dan ras yang ketiga adalah *Inlander*, yang diterjemahkan yaitu “Pribumi” (Kompas.com, 2017).

Adanya aturan yang mengatur orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 konsekuensi dengan perincian dalam Pasal 1 huruf a dan Pasal 1 huruf b UU No.3 tahun 1946 tentang warga Negara dan Penduduk Negara RI. Pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menggunakan contoh untuk orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara dengan istilah “Peranakan”, maka penjabaran siapa saja Warga Negara Indonesia dalam UU 1946 No.3 digunakan kriterium turunan yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang ini. selanjutnya bahasa sehari-hari untuk orang-orang bangsa Indonesia asli digunakan istilah “asli”. Sedangkan untuk orang-orang bangsa lain Pemerintahan menggunakan istilah “Warga Negara Turunan Asing “ atau disingkat “TURSING” yang sangat disayangkan yaitu sampai dengan amandemen keempat UUD 1945 tidak diadakan perubahan pada Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dimana masih terdapat kata “Indonesia asli”. Menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap etnis tertentu di Indonesia karena masih terdapatnya kalimat “warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli” maka hal ini merupakan pembenaran (legitimasi) atas tindakan diskriminasi pemerintah (negara) terhadap warga negaranya sendiri (Ngadino, 2009).

Permasalahan yang terjadi yaitu mengenai penduduk asli “mayoritas” dan pendatang “minoritas” sehingga adanya diskriminasi dari golongan mayoritas merasa akan lebih berkuasa dari pada golongan minoritas. Sehingga membuat golongan minoritas akan merasa terkucilkan dalam lingkungannya. Melihat kondisi DKI Jakarta yang merupakan daerah majemuk, perpecahan dapat dengan mudah terjadi pada daerah yang majemuk yaitu sangat rentan terjadi karena banyaknya perbedaan yang ada dan belum tentu setiap suku maupun etnis yang ada di Jakarta bisa paham dan saling mengerti dengan etnis lainnya. Pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 isu agama, isu etnis juga turut mewarnai berjalannya proses tersebut, yang menyerang salah satu kandidat yaitu Ahok yang menjadi objeknya, yang menganut agama Kristen dan keturunan etnis China. Etnis China merupakan golongan minoritas di Jakarta secara golongan Ahok berasal dari golongan minoritas karena beragama Kristen dan keturunan etnis China. Menjadikan adanya gejolak politik identitas di pilkada tersebut, Maka adanya perbedaan antara etnik China dan pribumi menjadikan etnik China sulit untuk di terima sebagai bagian dari Indonesia (Sipahutar, 2018).

Politisasi Isu pribumi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 di gunakan untuk menjaring suara dimana isu yang digunakan untuk memilih kepala daerah yang berasal dari daerah asal atau pribumi. Adanya rasisme yang dilakukan terhadap kelompok etnis tertentu yang pada dasarnya karena alasan politik. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat secara umum untuk membenci terhadap

kelompok etnis tertentu, apalagi pada era saat ini penyebaran kebencian bisa berkembang lebih luas melalui media sosial. Dengan adanya media sosial menjadikan segala bentuk informasi yang luas dan beragam dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu peristiwa. Apalagi informasi yang disajikan tersebut dilakukan secara terus-menerus, secara tidak langsung pikiran masyarakat akan terpengaruhi dan menjadikannya opini masyarakat (Geotimes.com, 2017).

Laporan Tetra Pak Index 2017 pengguna media sosial meningkat yaitu pengguna internet di Indonesia diperkirakan 132 juta. Pengguna media sosial yaitu berkisar 40%. Dari data tersebut adanya peningkatan dibanding tahun 2016, meningkatnya pengguna internet di Indonesia sekitar 51% atau 45 juta pengguna diikuti pertumbuhan yaitu sebesar 34% pengguna aktif media sosial. Pada pengguna media sosial yang mengakses melalui mobile berada di angka 39%. Adanya lebih dari 106 juta orang Indonesia sebagai pengguna media sosial tiap bulannya. Dengan 85% di antaranya mengakses media sosial melalui perangkat seluler (Detik.com, 2017).

Habernas (dalam Ardha, 2014) semakin meningkatnya pengguna Media sosial dimanfaatkan oleh politisi, warga dan wartawan seperti *twitter*, *facebook*, dan *youtube* sebagai bentuk untuk mendukung dari tujuan-tujuan dari politik mereka, sehingga nantinya mereka bisa terlibat dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam ruang publik politik, kampanye, menyebarkan atau mengambil informasi dan berkontribusi terhadap perdebatan rasional kritis. Dengan menguasai komunikasi

publik adalah salah satu kunci untuk bisa memenangkan kompetisi di dunia politik, saat ini salah satu chanel yang efektif adalah media sosial.

Pengaruh media sosial pada pilkada DKI Jakarta 2017 menurut survei yang dilakukan melalui media sosial oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 27 Februari - 3 Maret 2017 dengan 440 responden dengan metode *multistage random sampling dan margin of error* 4,8 persen. Menurut survei yang dilakukan, Mayoritas pemilih di DKI Jakarta aktif di media sosial sebanyak 58,9% dan 40,50% tidak aktif di media sosial. Dari pemilih yang aktif mengikuti perkembangan pilkada sampai hari tenang sebanyak 75,2%, Sedangkan hanya 11,5% tidak aktif di hari tenang. Para pemilih tersebut aktif di tiga platform media sosial, yaitu *Facebook, Instagram* dan *Twitter*. Untuk yang aktif di *Facebook* sebanyak 57,80 persen , *Instagram* sebanyak 29,30% dan *Twitter* sebanyak 17,20% (Detik.com, 2017).

Dengan memanfaatkan pengaruh dari media sosial Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2017 memiliki akun resmi di media sosial. Paslon nomor urut satu, pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana murni memiliki 3 akun media sosial. Untuk akun *Facebook* : AgusSylfiForDKI1, *Twitter* : @AgusSylviDKI, *Instagram* : @AgusSylviForDKI1. Paslon nomor dua, Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat juga menggunakan 3 akun media sosial. Akun *Facebook* : AhokDjarot, *Twitter* : @AhokDjarot, *Instagram* : @AhokDjarot dan situs resmi dengan nama www.ahokdjarot.id. Terakhir, paslon nomor tiga, Anis Baswedan dan Sandiaga

Uno. Akun *Facebook* : AnisSandi, *SuaraAnies Twitter* : @jktmajubersama, @SuaraAnies *Instagram* : Jakartamajubersama, *SuaraAnies* (Detik.com, 2016).

Akun media sosial yang digunakan para Cagub-Cawagub digunakan sebagai strategi kampanye, penajaman visi-misi dan sosialisasi program. Karena media sosial sebagai sarana paling efektif melihat pada jumlah pengguna aktif jejaring sosial. Pengaruh media sosial memiliki peran penting untuk mengubah penilaian orang tentang suatu hal sehingga lebih efektif untuk menjaring pemilih (Tempo.com, 2017). Pada pilkada DKI Jakarta 2017 dengan para paslon memiliki akun media sosial menimbulkan efek positif dan juga efek negatif dari media sosial itu sendiri yaitu dengan adanya praktik *hatespeech* atau ujaran kebencian (SARA) yang disebarakan yaitu melalui media sosial, berita dan informasi mengenai ketiga paslon Cagub dan Cawagub DKI Jakarta yang banyak diperbincangkan di media online oleh para pendukung maupun *haters* (pembenci) masing-masing. Pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 sarat dengan ujaran kebencian yang dikembangkan masing-masing pendukung terhadap rival mereka (Juditha, 2017). Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Penulis akan membahas tentang “Politisasi Isu Pribumi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di Media Sosial : Analisis Antara Kubu Ahok dan Anies”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Politisasi Isu Pribumi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 melalui Facebook ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Politisasi Isu Pribumi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 melalui Facebook.

2. Manfaat Penelitian

a) Teoritis

Bagi publik penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengetahuan baru tentang komunikasi politik dan bagaimana sifat media online yang tidak bebas dari beberapa isu pemberitaan seperti pemberitaan yang menyajikan isu politik.

b) Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan, serta pendidikan politik tentang Politisasi Isu Pribumi

Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di Media Sosial. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang.

1.4 TINJAUAN PUSTAKA

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, maka dibawah ini dapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang terdapat kaitannya dengan skripsi yang penulis angkat yaitu :

Penelitian Sari (2016), menyatakan bahwa kebangkitan politik identitas Islam pada arena pemilihan gubernur Jakarta. Perspektif konstruktivisme yang digunakan oleh peneliti adalah pandangan Pierre Van Den Bergh (1991) yang berpendapat bahwa politik identitas baik etnik maupun agama sengaja dikonstruksi oleh elit politik untuk mendapatkan kuasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Fenomenologi. Kebangkitan politik identitas Islam terjadi melalui upaya pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri sebagai Muslim yang terhina sehingga sesama Muslim harus memilih mereka yang seagama dan seiman. Kondisi ini dihadirkan untuk membangun psikologis sebagai mayoritas yang terluka sekaligus ruang untuk membangun batas kuasa mayoritas kepada mereka yang dipandang minoritas demi mempertahankan demarkasi kekuasaan dan kepentingan elit politik dengan mengatasnamakan agama.

Penelitian Lubis (2012), menyatakan bahwa komunikasi antarbudaya mempengaruhi pandangan dunia etnis Tionghoa dan pribumi di kota Medan. Tiga elemen pandangan dunia yang diteliti meliputi agama atau kepercayaan, nilai-nilai dan

perilaku, yang merupakan bagian dari teori persepsi budaya menurut Larry A.Samovar, Richard E.Porter dan Edwin R.McDaniel. melihat berbagai situasi atau realitas sosial yang berlaku terhadap etnis Tionghoa dan pribumi di kota Medan. Penelitian menggunakan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan etnis Tionghoa dan pribumi. agama atau kepercayaan merupakan satu yang hak dan tidak dapat dipaksa. Namun melalui perkawinan antara etnis Tionghoa dan pribumi maka terjadinya perpindahan agama kepada Islam dan Kristen sehingga pandangan keagamaanpun berubah. Selain itu, komunikasi antarbudaya dapat mengubah cara pandang terhadap nilai-nilai budaya Tionghoa dan Pribumi di kota Medan. Dengan demikian mendorong perilaku individu menjadi positif dan sekaligus pandangan dunianya.

Faridah & Mathias (2018), menyatakan bahwa Penggunaan dosis agama sebagai instrumen politik untuk memperoleh kekuasaan dalam pemilu marak terjadi akhir-akhir ini. Agama sebagai sesuatu yang suci dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan masyarakat melalui perbedaan dalam berkeyakinan. Sebab agama merupakan sesuatu yang sakral dan bersifat pribadi menjadikan hal ini mudah untuk di politisir berkenaan dengan isu ini yang sangat sensitive. Agama sebagai sesuatu yang sensitive menjadikan segala hal yang berkenaan dengannya menjadi lebih emosional. Keterlibatan emosi ini dibangun oleh keyakinan pada sesuatu yang gaib. Politisasi agama telah dijadikan sebagai politik hitam yang memanipulasi pemahaman dan pengetahuan seseorang mengenai agama dengan cara propaganda yang bermaksud untuk memengaruhi agama/kepercayaan dalam upayanya memasukan kepentingan kedalam sebuah agenda politik. Yang dikhawatirkan adalah agama kehilangan nilai-

nilai luhurnya saat dikaitkan dengan politik atau di politisasi (dikotori). Penolakan politisasi agama merupakan salah satu bentuk upaya dalam memuliakan agama dan mencegah rusaknya nilai-nilai luhur yang ada dalam sebuah agama serta menjaga keberagaman dan keutuhan bangsa kita.

Penelitian Arifina (2017), menyatakan bahwa pada situasi sosial yang terjadi di Indonesia, diakibatkan dari konflik horizontal dengan sentimen agama mengalami eskalasi semenjak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017. Permasalahan kasus dugaan penistaan Islam oleh Ahok menggulirkan efek bola salju politik yang bisa mengancam keamanan nasional. Penggunaan media sosial dikawal oleh pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Manajemen konflik keagamaan juga sebaiknya didukung oleh semua stakeholder termasuk netizen yang diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab atas apa yang disembarkannya serta tidak mudah terpancing informasi yang beredar di media sosial.

Penelitian Tajuddin&Sani (2016), menyatakan bahwa berbagai kasus konflik di Indonesia : dari isu Non Pribumi, Isu Agama, hingga Isu Kesukuan menjelaskan bahwa banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia, yang khususnya yang berkaitan dengan isu non pribumi, isu agama dan isu kesukuan. Ada berbagai faktor yang mengakibatkan konflik di Indonesia seperti isu keberadaan non pribumi melawan pribumi, dan konflik agama yang mengakibatkan perpecahan di sini khususnya pada konflik antara agama Islam dan agama Keristen dan isu Kesukuan, yang khususnya dominasi suku jawa pada

sejarah panggung perpolitikan di Indonesia. Dan terjadinya konflik atas dasar isu-isu yang ditimbulkan atas dasar kesenjangan ekonomi politik yang terjadi di Indonesia seperti pada kekayaan non-pribumi atas pribumi, kekayaan minoritas Keristen atas mayoritas Islam, dan juga suku Jawa atas Non Jawa dalam pentas politik. Begitu juga konflik Ambon dan Sambas sebagai adanya konsekuensi logis dominasi ekonomi Bugis makassar dan dominasi Suku Madura atas penduduk setempat.

Penelitian Haboddin (2012), menyatakan bahwa menguatnya suatu politik Identitas di tingkat local terjadi dengan bersamaan dengan politik desentralisasi. Pada pasca UU No. 22/1999, gerakan politik Identitas terlihat semakin jelas. Yaitu faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu seperti ini secara intens untuk pembagian kekuasaan. Dengan politik Identitas yang terjadi di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya, pada kasus ini terlihat yaitu menguatnya isu ini. Isu ini digunakan oleh aktor politik ketika melakukan negoisasi dengan entitas politik lainnya.

Penelitian Syahputra (2016), menyatakan bahwa banyaknya ujaran kebencian yang di lakukan dengan cara menyebarkan melalui aktivitas media sosial muncul dikarenakan adanya suatu eforia kebebasan menyampaikan pendapat dalam suatu negara yang demokratis. Ujaran kebencian memang efektif digunakan sebagai kampanye negatif pada saat pemilihan umum. Bahwa perang yang di lakukan melalui siber di media sosial telah membentuk dua polarisasi netizen. Dengan polarisasi tersebut dapat diidentifikasi sebagai kelompok konservatif dan kelompok liberal. Kedua

kelompok tersebut aktif dengan memproduksi wacana, opini, informasi, isu dan rumors melalui media sosial. Menemukan bahwa adanya perubahan atau pergeseran konsep opinion leader pada teori two step communication. Konsep opinion maker dalam tradisi media baru yang muncul saat ini memungkinkan siapa saja secara anonim menjadi opinion leader.

Penelitian Sipahutar (2018), menyatakan bahwa pada konteks kata "pribumi" pada pidato yang di bawakan Anies Baswedan pada tanggal 16 Oktober 2017 di Balai Kota DKI, secara keseluruhan isi dari pidato yaitu mengenai pribumi dalam pidatonya Anies Baswedan pasca pelantikannya sebagai Gubernur Jakarta mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat karena penggunaan kata pribumi sudah dilarang sejak tahun 1998. kata "pribumi" adalah pengganti kata "inlander" yang merupakan sebutan yang diberikan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menyebutkan orang Indonesia asli. Kata "pribumi" dalam pidato Anies Baswedan tersebut tidak mendapatkan makna defenitif untuk menyebutkan pribumi pada masa kolonialisme karena adanya tarik ulur waktu dari masa kolonialisme ke masa sekarang sehingga pengertiannya bisa merujuk kepada pribumi di masa sekarang. Sedangkan kata "pribumi" selalu disandingkan dengan "non pribumi", dan "non pribumi" bisa merujuk kepada satu etnis yaitu Tionghoa. Secara keseluruhan, hal yang paling sering di tegaskan Anies adalah keadilan dan kesejahteraan sebagai komitmen Anies pada saat kampanye pada Pilkada Jakarta.

Penelitian Clarke (2009), menyatakan bahwa Identitas adalah kunci kontemporer dalam pendidikan, referensi individu dan sosial, pribadi dan politik, diri dan lainnya.

Setelah Maggie MacLure, yang dapat kita pikirkan dari identitas yaitu dalam hal guru 'berdebat untuk diri mereka sendiri', atau memberikan nilai dari diri mereka sendiri. Namun di bangun dari pra-strukturalisme radikal keterpusatan subjek dan menyoroti beberapa hambatan untuk pribadi, kita mungkin bertanya bagaimana guru yang memberikan rekening dari diri mereka sendiri. Dalam ini, menawarkan pembacaan mengenai identitas yang mengakui aspek paradoks, namun juga mengandung lingkup badan etis. Yang kedua adalah dieksplorasi melalui 'diagram' yang memanfaatkan Foucault's empat sumbu etika untuk menguraikan kerangka kerja untuk berpikir tentang identitas guru sebagai pembentukan diri etis dan terlibat dalam apa yang saya sebut di sini sebagai 'identitas bekerja'. Pendekatan ini untuk berpikir tentang identitas guru mengakui tekad diskursif, namun juga menawarkan ruang lingkup untuk mengenali dan membangun etika pribadi.

Penelitian Flesken (2018), menyatakan bahwa pengaruh politik etnis berlimpah, tetapi kurang perhatian dan mengapa partai-partai etnis terbentuk. Asumsi ini tentang lokasi agensi (kaum elit vs. rakyat) dan motif untuk pembentukan partai (kantor vs. pencarian kebijakan). Berdasarkan pendaftaran partai dan faktor-faktor sosial ekonomi di 327 kota Bolivia selama pemilu 2004. Pemilu berlangsung di bawah aturan pemilihan baru selama periode restrukturisasi politik, memungkinkan analisis keputusan masuk partai. Melalui serangkaian pendekatan gerakan dan berbagai pemeriksaan ketahanan, gerakan ini melibatkan pengembangan administrasi politik dan kesetaraan sosio-ekonomi mendorong pembentukan partai etnis.

Penelitian Mardiana (2017), menyatakan bahwa penggunaan isu sara pada pelaksanaan Pilkada DKI sebagai black campaign hal itu, sangat mempengaruhi elektabilitas dari seseorang pemilih. Dihitung pada pemilih paslon no 3 menang pada tahap terakhir. Pada pertama pasangan nomor dua memenangkan Pilkada DKI Jakarta tetapi berlangsung selama dua putaran kerana, pada putaran pertama tidak ada paslon yang mendapatkan lebih dari 50%. Hasil dari putaran pertama pasangan nomor 1 sebanyak 21, 12%, pasangan nomor 2 sebanyak 37, 48%, dan pasangan nomor 3 yaitu sebanyak 41,40% dan pada putaran pertama pasangan nomor satu gugur dikarenakan suara terendah. Pada putaran 2 dimenangkan oleh pasangan nomor 3 yang jauh perolehan suara didapatkan oleh pasangan nomor 2 dikarenakan menjelang tahap 2 ini pembelaan islam semakin memanas aksi agama semakin kuat. Diakrenakan paslon no 2 terkena kasus penistaan agama yang mempengaruhi terhadap pemilihan paslon nomor 2 yang memiliki jauh persentasi pasangan nomor 3 sebanyak 25,45%.

Penelitian Imitiyaz (2014), menyatakan bahwa agama yang terorganisir sering memainkan peran penting dalam urusan politik negara manapun ketika para aktor politik secara hati-hati mempekerjakan mereka untuk mengejar kekuasaan. Agama Buddha adalah agama utama di pulau Sri Lanka, dan seringkali menjadi simbol kuat bagi para politisi Sinhala-Buddha. Mengetahui bagaimana interaksi antara agama Buddha dan politik di Sri Lanka, juga untuk memeriksa faktor-faktor agama dalam konflik etnis Sri Lanka antara kedua negara; yaitu, Tamil dan Sinhala. Adanya politisasi agama Buddha membantu para elit dan pemimpin politik Sinhala dalam

pencarian mereka akan kekuasaan, memperkuat ketegangan agama dan etnis, dan akhirnya akan membahas beberapa solusi untuk merendahkan struktur negara untuk membantu Sri Lanka menikmati buah modernisasi dan demokrasi.

Penelitian Adrian (2013), menyatakan bahwa kepulauan Indonesia terdiri beragam etnis dan agama, keanekaragaman budaya yang menghasilkan identitas tersendiri bagi masyarakat dan wilayah. Identitas bisa muncul melalui kesamaan etnis, ideologi, atau agama. Di negeri ini, identitas kerap dijadikan salah satu untuk menjelakan atau menjatuhkan lawan politiknya. Otonomi daerah memberikan tempat yang luas kepada etnis untuk menunjukkan identitas politiknya. Identitas politik dibangun oleh elite politik dalam melakukan tindakan yang terkait dengan kepentingan wilayah etnis. Elite menggunakan etnisitas sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, persaingan untuk mendapatkan sumberdaya, menciptakan solidaritas dan kebersamaan memperkuat identitas serta membedakan dengan kelompok etnik lain.

Penelitian Ardha (2014), menyatakan bahwa Pengaruh media sosial yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat berdasarkan eksklusif pada aspek sosialnya, interaksi dan partisipasi yang bisa dilakukan melalui kampanye. Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Berkembangnya teknologi internet dan banyak penduduk di Indonesia menggunakan internet serta mempunyai media sosial seperti facebook, twitter, blog dan youtube. Saat ini, Indonesia menempati urutan kedelapan di seluruh dunia. Layanan jaringan media sosial yang khas bisa berbagi konten, komunitas web, dan forum internet media sosial

dari alat dan komunitas yang berbeda. Penggunaan media sosial itu harus direncanakan, dikomunikasikan dan di program untuk meningkatkan kredibilitas partai. komunikasi organisasi adalah pertimbangan yang penting untuk memastikan cukup interaksi dalam platform media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam kampanye politik politik 2014. penggunaan media sosial melalui platform seperti Facebook , Twitter , dan Youtube , kandidat politik akan terus berinteraksi dengan pendukung dan menerima dukungan dalam bentuk sumbangan dan relawan.

Tabel 1.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Isi	Jurnal
1.	Haboddin	Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal	2012	Politik Identitas di tingkat lokal terjadi yaitu bersamaan dengan politik desentralisasi. Pada pasca UU No. 22 tahun 1999, gerakan politik Identitas terlihat semakin jelas. faktanya, banyak aktor baik lokal dan politik nasional menggunakan isu untuk pembagian kekuasaan.	Jurnal Studi Pemerintahan
2.	Flesken	Why Ethnic Parties form: Evidence from Bolivia	2018	Pengaruh politik etnis banyak Asumsi mengenai lokas agensi oleh kaum elit vs rakyat dan motif untuk pembentukan partai vs pencarian kebijakan. Berdasarkan pada pendaftaran partai dan faktor-faktor sosial ekonomi di 327 kota Bolivia selama pemilu 2004. Pemilu berlangsung selama periode restrukturisasi politik. Gerakan dan berbagai pemeriksaan ketahanan, pada gerakan ini melibatkan pengembangan administrasi politik dan kesetaraan sosio-ekonomi mendorong pembentukan partai etnis.	Jurnal Of The Association For The Study of-Ethnicity and Nationalism

3.	Ardha	Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia	2014	Pengaruh dari media sosial untuk mempengaruhi masyarakat berdasarkan pada eksklusif pada aspek sosial, interaksi dan partisipasi yang bisa dilakukan melalui kampanye. Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Melalui teknologi internet masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, blog dan youtube. Media sosial memainkan peran penting dalam kampanye politik 2014. media sosial melalui platform seperti Facebook , Twitter , dan Youtube , kandidat politik saling berinteraksi dengan pendukung dan menerima dukungan dalam bentuk sumbangan dan relawan.	Jurnal Visi Komunikasi
4.	Sari	Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta	2016	Kebangkitan politik identitas Islam pada arena pemilihan gubernur Jakarta. politik identitas baik etnik maupun agama sengaja dikonstruksi oleh elit politik untuk mendapatkan kuasa Kebangkitan politik identitas Islam terjadi melalui upaya pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri sebagai Muslim yang terhina sehingga sesama Muslim harus memilih mereka yang seagama dan seiman. kuasa mayoritas kepada mereka yang dipandang minoritas demi mempertahankan kekuasaan dan kepentingan elit politik dengan mengatasnamakan agama.	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
5.	Imtiyaz	Buddhism and Electoral Politics in Sri Lanka Politicization, tensions and dpoliticization of Buddhism	2014	Agama yang terorganisir sering memainkan peran penting dalam urusan politik negara manapun ketika para aktor politik secara hati-hati mempekerjakan mereka untuk mengejar kekuasaan. Agama Buddha adalah agama utama di pulau Sri Lanka, dan seringkali menjadi simbol kuat bagi para politisi Sinhala-Buddha. Interaksi antara agama Buddha dan politik di Sri Lanka, sebagai faktor-faktor agama dalam konflik etnis Sri Lanka antara kedua negara; yaitu, Tamil	Jurnal Of Asian and African Studies

				dan Sinhala. Adanya politisasi agama Buddha membantu para elit dan pemimpin politik Sinhala dalam pencarian mereka akan kekuasaan, memperkuat ketegangan agama dan etnis, dan akhirnya akan membahas beberapa solusi untuk merendahkan struktur negara untuk membantu Sri Lanka menikmati buah modernisasi dan demokrasi.	
6.	Tajudin & Sani	Berbagai Kasus Konflik di Indonesia: dari Isu Non Pribumi, Isu Agama, hingga Isu Kesukuan	2016	Konflik di Indonesia : dari isu Non Pribumi, Isu Agama, hingga Isu Kesukuan menjelaskan bahwa banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia, yang khususnya yang berkaitan dengan isu non pribumi, isu agama dan isu kesukuan. Faktor yang mengakibatkan konflik di Indonesia seperti isu keberadaan non pribumi melawan pribumi, dan konflik agama yang mengakibatkan perpecahan di sini khususnya pada konflik antara agama Islam dan agama Keristen dan isu. Konflik isu yang ditimbulkan atas dasar kesenjangan ekonomi politik yang terjadi di Indonesia seperti pada kekayaan non-pribumi atas pribumi, kekayaan minoritas Keristen atas mayoritas Islam.	Jurnal Sulesana
7.	Faridah & Mathias	Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu	2018	Agama sebagai instrumen politik untuk memperoleh kekuasaan dalam pemilu. Agama sebagai sesuatu yang suci dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan masyarakat karena, agama merupakan sesuatu yang sakral dan bersifat pribadi menjadikan mudah untuk di politisir berkenaan dengan isu ini yang sangat sensitive. Agama sebagai sesuatu yang sensitive menjadikan bekenaan dengannya menjadi lebih emosional. Agama digunakan dengan cara propaganda yang bermaksud untuk mempengaruhi agama kepercayaan kedalam kepentingan agenda politik.	Jurnal Unnes
8.	Lubis	Komunikasi Antarbudaya Etnis	2012	Komunikasi antarbudaya pada etnis Tionghoa dan pribumi di kota Medan. Melalui Tiga elemen meliputi agama	Jurnal Ilmu Komunikasi

		Tionghoa dan Pribumi di Kota Medan		atau kepercayaan, nilai-nilai dan perilaku, yang merupakan bagian dari teori persepsi budaya menurut Larry A.Samovar, Richard E.Porter dan Edwin R.McDaniel. Agama/kepercayaan merupakan satu yang hak dan tidak dapat dipaksa. Melalui perkawinan antara etnis Tionghoa dan pribumi maka terjadinya perpindahan agama kepada Islam dan Kristen sehingga pandangan keagamaanpun berubah. Selain itu, komunikasi antarbudaya dapat mengubah cara pandang terhadap nilai-nilai budaya Tionghoa dan Pribumi di kota Medan.	
9.	Syahputra	Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial : Perspektif Netizen Indonesia	2017	Ujaran kebencian yang dilakukan dengan cara menyebarkan melalui aktivitas media sosial muncul dikarenakan adanya suatu eforia kebebasan menyampaikan pendapat dalam suatu negara yang demokratis. Ujaran kebencian memang efektif digunakan sebagai kampanye negatif pada saat pemilihan umum. Bahwa perang yang dilakukan melalui siber di media sosial telah membentuk dua polarisasi netizen.	Jurnal Aspikom
10.	Arifina	Literasi Media Sebagai Manajemen Konflik Keagamaan di Indonesia	2017	Konflik horizontal melalui sentimen agama semenjak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017. Permasalahan kasus dugaan penistaan Islam oleh Ahok menggulirkan efek bola salju politik yang bisa mengancam keamanan nasional. Penggunaan media sosial dikawal oleh pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Manajemen konflik keagamaan juga sebaiknya didukung oleh semua stakeholder termasuk netizen yang diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab atas apa yang disebarkannya serta tidak mudah terpancing informasi yang beredar di media sosial.	Jurnal Komunikasi dan Kajian Media

Sumber : Diolah oleh Penulis (2019)

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masing -masing penelitian membahas tentang politik identitas , konflik isu pribumi dan non-Pribumi, dan pengaruh media sosial. Terdapat beberapa penelitian tentang politik identitas, namun belum ada yang fokus penelitiannya mengenai politisasi isu pribumi di media sosial melalui *Facebook*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana politisasi isu pribumi di media sosial.

1.5 KERANGKA DASAR TEORI

Dari topik penelitian ini, setidaknya ada dua jenis kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, teori tentang Politisasi Isu Pribumi, Kedua, teori tentang teori Media Sosial. Secara spesifik, kedua kerangka teori akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pilkada

Simamora (2011) Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan ditingkat lokal. Maka dari itu, makna dan tujuan pelaksanaan pemilukada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Pemilukada merupakan pelaksanaan pemilu ditingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin daerah. Sebagai sebuah aktivitas politik pemilihan umum daerah memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interpedensi. Adapun fungsi – fungsi dari pemilihan umum sebagai berikut :

- a) Sebagai sarana legitimasi politik fungsi dari legitimasi yaitu menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum kepala daerah, pemerintah daerah yang berkuasa dapat ditegakkan begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.
- b) Fungsi perwakilan politik menjadi kebutuhan masyarakat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.
- c) Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah. Keterkaitan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu diharapkan selama pemilihan umum kepala daerah dapat berlangsung pergantian atau

sirkulasi elit penguasa tingkat daerah secara kompetitif dan demokratis.

- d) Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

Nopyandri (2008) Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri merupakan dari, oleh, dan untuk rakyat serta diharapkan dalam proses penyelenggaraanya dilakukan jujur, adil, dan aman. Sistem yang pemilihan secara langsung yang dilaksanakan pada pemilihan kepala daerah diharapkan pemimpin yang membawa perubahan baik dalam suatu kabupaten/kota yang dipimpinnya. Baik secara moral adanya ikatan dan tanggungjawab kepada konstitusi serta pemilihnya yaitu masyarakat yang dipimpinnya. Pada proses Pilkada yang dilakukan secara langsung telah dilakukan sejak tahun 2005, yang berdasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung.

Menurut Budiarjo (2007:461) dari perspektif politik dan pemerintahan, penyelenggaraan Pilkada memang memberi ruang bernafas yang lebih longgar bagi

partisipasi otonomi masyarakat. Pilkada langsung yang semestinya memiliki makna mendalam dan amat berarti dapat menjadi ajang penguatan *civil society* karena menentukan kepala daerah tidak lagi menjadi urusan dominan aktor tunggal yang dalam hal ini adalah politik dan lembaga legislatif.

Menurut Suparno (2018) Pilkada langsung diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan pemerintahan daerah, dan kinerja lembaga-lembaga politik yang ada di daerah. Ada tiga tujuan mendasar mengapa pilkada diselenggarakan secara langsung. Tujuan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk membangun demokrasi tingkat lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung tertangani oleh kepala daerah terpilih.
2. Untuk menata dan mengelola pemerintahan daerah (*local democratic governance*), semakin baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat.
3. Untuk mendorong bekerjanya lembaga-lembaga politik lokal. Melalui pilkada secara langsung diharapkan lembaga-lembaga politik lokal dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan rakyat.

Menurut Nugraha&Mulyandri (2016) Asas-asas yang berlaku dalam penyelenggaraan pilkada langsung sama dengan asas-asas yang berlaku dalam pemilu. Asas pilkada merupakan prinsip-prinsip yang harus dijalankan

dalam penyelenggaraan pilkada serta sebagai sarana agar pilkada terlaksana dengan demokrasi. Pilkada langsung harus diakui sebagai peluang dari banyaknya partisipasi politik memberikan harus diakui sebagai peluang dari banyaknya partisipasi politik memberikan ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan kepentingannya. Tidak saja menyuarakan tetapi masyarakat juga mengontrol kepala daerah untuk selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat karena ketika pilkada langsung maka masyarakatlah yang memberi mandat langsung kepada pemimpin daerah.

Namun ternyata ada beberapa kelemahan dari penyelenggaraan pilkada yakni :

- a) Dana yang dibutuhkan besar.
- b) Membuka kemungkinan konflik elite dan masa.
- c) Aktivitas rakyat terganggu

Walaupun memiliki kelemahan pilkada memiliki keunggulan yaitu :

- a) Adanya mandat dan legitimasi yang kuat terhadap kepala daerah yang jadi karena dukungan suara rakyat.
- b) Kepala daerah tidak perlu terikat pada konsensi partai-partai dan fraksi-fraksi yang telah mencalonkannya.
- c) *Check and balance* dapat berjalan secara seimbang dan baik antara legislatif dan eksekutif.

2. Politik Identitas

Politisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) yaitu membuat suatu keadaan (perbuatan, gagasan, dsb) bersifat politis. Sehingga makna politisasi adalah segala bentuk tindakan, baik melalui gagasan atau perbuatan yang bersifat seperti menghadapi maupun memperoleh kekuasaan atau kebijaksanaan (politis).

Tournquist (2005 hal: 125) menjelaskan bagaimana cara aktor menetapkan isu dan kepentingan dalam istilah-istilah politik dan bagaimana mencoba menggalang dukungan politik supaya bisa terus-menerus mengikuti langkah mereka, dengan menggunakan politisasi yang terdiri dari tiga dimensi :

1. Isu dan Kepentingan

Isu merupakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Isu muncul disebabkan adanya ketidaksesuaian pengharapan publik. Isu bisa meliputi masalah, berita atau kabar, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan. Oleh karena itu isu dalam politik biasanya digunakan untuk kepentingan tertentu yang bersangkutan-paut dengan aktor politik, organisasi, gerakan tertentu, dan kelompok penekan.

2. Agenda Politik

Serangkaian isu-isu yang diberitakan, digambarkan dan menjadikan pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap persoalan yang muncul sehingga menjadi informasi bagi publik. Agenda politik biasanya dalam bentuk opini dalam berita-berita propaganda dan kampanye sehingga

dapat mempengaruhi publik dengan seperti itu menghasilkan keuntungan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

3. Partisipasi

Keikutsertaan dan emosi seseorang dalam memberikan respon terhadap suatu proses serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan proses politik yang demokratis, yang melibatkan interaksi perseorangan dan organisasi. Partisipasi politik dihubungkan dengan demokrasi politik yang mengedepankan prinsip perwakilan dan partisipasi tidak langsung.

Embelin (dalam Djuyandi, 2014) politisasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan meluas untuk membuat pertanyaan menjadi pertanyaan politik, semua isu menjadi isu-isu politik, semua nilai menjadi nilai-nilai politik, dan semua keputusan menjadi keputusan-keputusan politik. Dari penjelasan di atas mendapatkan empat hal yang menjadi indikator dalam politisasi kebijakan:

1. Pertanyaan Politik

Adanya politisasi yaitu ketika muncul kecenderungan untuk membuat semua pertanyaan menjadi pertanyaan politik (making all questions political questions). Sebagai pertanyaan politik sehingga bisa mengetahui dan paham.

2. Isu Politik

Masalah mengenai isu-isu politik (*all issues political issues*) merupakan salah satu indikator lainnya yang dapat menganalisis tentang politisasi. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, termasuk dalam bidang sosial, politik, dan hukum.

3. Nilai Politik

Menjadikan nilai menjadi nilai politik (*all values political values*). Nilai merupakan sesuatu yang menunjukkan kualitas atas suatu hal, nilai terkadang bersifat abstrak dan menyangkut etika, baik atau buruk.

4. Keputusan Politik.

Keputusan politik yang di ambil dari sebuah kebijakan menjadi keputusan politik yaitu (*all decisions political decisions*). Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau membuat kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya sebuah kebijakan ditetapkan melalui sebuah keputusan yang disepakati bersama, dalam sebuah negara demokrasi kebijakan diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam rangka *check and balance*.

Kemala (dalam Haboddin,2012) politisasi yang dilakukan didalam politik identitas yaitu digunakan sebagai alat memanipulasi untuk menggalang politik sebagai kepentingan ekonomi dan politik. Argumen Kemala mengatakan bahwa:

Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: Pertama, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Kedua, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Terakhir, kesetiaan yang kuat terhadap etnistas yang dimilikinya.

Mukhan (2008 hal: 30), identitas politik sebagai simbolik yaitu merupakan kebutuhan eksistensial manusia dalam hidup sosial, ekonomi, politik, dan keagamaanya. Kegiatan ilmiah seringkali menjadi identitas eksistensial manusia, bukan semata bagi kepentingan ilmiah yang netral. Namun karena itu, manusia seringkali terperangkap dalam budaya identitas yang tak jarang membawanya ke dalam situasi konflik dan kekerasan. Seperti halnya manusia mempergunakan identitas eksistensial itu secara kritis dengan kearifan bagi kepentingan diri dan kemanusiaan dalam arti yang lebih tradisional dan universal.

Buchari (dalam Sipahutar 2018), politik Identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan yaitu berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa politik identitas

merupakan alat perjuangan yang digunakan suatu kelompok untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kelompok tersebut.

Mengenai proses terjadinya pembentukan dari Politik Identitas itu sendiri Menurut Sari (2016) ada tiga pendekatan pembentukan identitas yaitu:

1. Primordialisme : identitas diperoleh secara turun-temurun seperti pada agama maupun etnis dengan pendekatan ini dijadikan sumber utama kepada seseorang apakah orang tersebut memiliki agama yang sama atau etnis yang sama dengan dirinya.
2. Konstruktivisme : identitas sebagai suatu yang dibentuk pada proses sosial yang kompleks. Identitas dibentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat, dalam pembentukan identitas lahir dari penggalian dan penanaman nilai sosial seperti pada Bhineka Tunggal Ika yang merupakan identitas kolektif bangsa dengan upaya untuk mempersatukan golongan yang ada di Indonesia baik agama maupun etnis.
3. Instrumentalisme : identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan pembentukan identitas, biasanya identitas ini digunakan untuk pemilu untuk memposisikan calon sebagai sama dengan masyarakat.

Sipahutar (2018) menyatakan bahwa Secara historis politik Identitas yaitu berasal dari pribumi dan non pribumi yaitu muncul dimasa penjajahan Belanda ketika saat itu pemerintah kolonial Belanda membagi masyarakat yang tinggal di

daerah jajahan Hindia Belanda dalam tiga kategori, yaitu urutan stratifikasi teratas masyarakat yang didominasi masyarakat Eropa, lalu stratifikasi kedua yaitu masyarakat China, Arab, dan India yang rata-rata berprofesi sebagai pedagang yang diberikan status khusus oleh pemerintah kolonial Belanda, serta masyarakat pribumi yang tinggal sejak lama di daerah-daerah penjajahan Belanda, Mereka adalah penduduk setempat asli.

Ngadino (2009) pada konfigurasi pemilihan sosial pribumi-nonpribumi pada politik hukum Hindia Belanda. Pada masyarakat kolonial terdiri dari golongan Eropa, golongan Timur Asing yang sebagian besar terdiri dari kolektivitas Tionghoa, dan pribumi (inlanders) yang merupakan mayoritas penduduk Hindia Belanda. Struktur sosial masyarakat kolonial ini kemudian disebut sebagai struktur kasta kolonial, yang tidak hanya bermuatan perbedaan dalam status hukum, tetapi juga juga status sosial-ekonomi. Struktur sosial masyarakat kolonial yang demikian ini juga merupakan sumber-sumber konflik. Ketika negara ini terbentuk dan Belanda meninggalkan Indonesia yang muncul adalah konfigurasi sosial pribumi-nonpribumi tersebut.

Politisasi isu pribumi yaitu merupakan gagasan yang digunakan untuk kepentingan politik yang berasal dari identitas dan keturunan yang digunakan oleh elite politik, kelompok atau golongan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan.

3. Media Sosial

Media sosial menjadikan sesuatu menjadi mudah seperti interaksi antar individu, maupun individu dengan kelompok dengan berbagai fitur ditawarkan dalam berbagai aplikasi yang terdapat dalam media sosial seperti pada berikut terdapat pengertian dari media sosial :

Boyd menjelaskan media sosial yaitu sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi dan bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media sosial.

Van Dijk (2013), mengemukakan media sosial adalah platform media yang mengemukakan bahwa media sosial yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Maka itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Mandibergh (2012), menjelaskan bahwa media digunakan untuk mewedahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*).

Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama

(*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi.

Definisi dari media sosial adalah sebuah media komunikasi secara online, dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi atau konten yang dapat diolah orang yang memiliki akun media sosial.

A. Jenis Media Sosial

Nasrullah (2015), menjelaskan bahwa media sosial memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan fungsi dan konten apa saja yang disebarkannya sehingga membagi jenis media sosial menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1) *Social networking* atau media jaringan sosial merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial di dunia virtual dan konsekuensi dari hubungan sosial tersebut, seperti terbentuknya nilai-nilai, moral, dan etika.

2) *Blog* merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi baik tautan web lain, informasi, maupun lainnya.

3) *Microblogging* merupakan media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktivitas dan atau pendapatnya maksimal dengan 140 karakter.

4) *Media sharing* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya.

5) *social bookmarking* merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online.

6) *wiki* merupakan media atau situs web yang secara program memungkinkan para penggunaanya berkolaborasi untuk membangun konten secara bersama.

B. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding dengan media lainnya. Seperti pada media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual. Tidak berarti ada karakter umum atau marko, hanya pembahasan karakteristik media sosial ini dipandang perlu untuk melihat perbedaan dengan media lainnya (Castells, 2004; Talalay et al., 1997; Thurlow, Lengel, & Tomic, 2004).

1) Jaringan

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Namun sebagaimana ditekankan oleh Castells (2002), struktur atau organisasi sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikroelektronik. Jaringan yang terbentuk antarpengguna (*users*) merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer telepon genggam, atau tablet.

2) Informasi

Media sosial informasi menjadi sebuah komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antarpengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat berjejaring (*network society*) Nasrullah (2015).

3) Konten Oleh Pengguna

Dalam media sosial pengguna tidak hanya memproduksi konten tetapi juga dapat mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lainnya. Pengguna dapat memproduksi konten sesuai dengan apa yang diinginkannya dan melihat konten dari pengguna lain (Fuchs,2014; Gane & Beer, 2008).

4) Penyebaran

Media sosial, penyebaran (*share/sahring*) suatu konten dapat dengan mudah karena adanya tombol share/bagikan. Ini memudahkan konten tersebar dan dapat berkembang karena mendapat komentar, like, dari pengguna lainnya (Benker,2012; Cross, 2011).

1.6 DEFINISI KONSEPTUAL

Untuk memberikan gambaran agar lebih jelas dan juga untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah-istilah penting antara konsep yang satu dengan yang lainnya sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu adanya diberikan definisi-definisi terkait konsep sebagai berikut:

1. Politisasi Isu Pribumi : proses penguatan identitas terhadap individu yang tujuannya untuk memperoleh kekuasaan. Pada proses penguatan identitas dimobilisasi oleh elite-elite politik dimana seseorang mencirikan sebagai salah satu identitas tertentu. Ketika citra personal dapat menjadi citra bagi suatu identitas tertentu maka dapat disebut sebagai politisasi identitas. Pada politisasi identitas berkaitan juga dengan (isu, berita, citra, maupun ekspresi komunikasi lainnya) yang di gunakan sebagai instrumen para elite politik, yang di gunakan biasanya pada proses pemilihan.
2. Media Sosial : media yang memungkinkan untuk bersosialisasi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna satu sama lain dan dilakukan secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan menggunakan media sosial yang efektif seperti *Facebook*.

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional yaitu bagian fundamental dalam suatu penelitian, karena pada bagian ini akan memberikan petunjuk dalam mengukur suatu variable dalam melakukan penelitian. Disini akan ditentukan indikator variabel dan bagaimana mengukur indikator tersebut. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.2
Operasional Konsep

Variabel	Indikator	Parameter
Politisasi Isu Pribumi	Isu dan Kepentingan	Analisis frekuensi isu dan kepentingan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 di media sosial melalui Facebook
	Agenda Politik	<ul style="list-style-type: none">- Cara memberitakan isu melalui opini berita- Cara memberitakan melalui kampanye di media sosial
	Partisipasi	Frekuensi respon masyarakat terhadap isu pada akun media sosial Cagub-Cawagub melalui Facebook

1.8 METODE PENELITIAN

1. jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Menurut Nazir (2003: 27), menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kajian terhadap buku-buku, literature, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah penting dimana setelah menentukan topik penelitian, langkah selanjutnya yaitu pencairan teori dengan mengumpulkan informasi-informasi serta data yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu melakukan kajian dan analisis mengenai teori yang sudah ditemukan.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan bersifat deskriptif dimana dengan disusun dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2010: 207). Kualitatif dipilih karena dirasa sangat tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini karena memberikan kesempatan peneliti untuk menganalisis dan fokus ke dalam topik yang akan diteliti secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Creswell (dalam Sugiyono, 2010) menyatakan bahwa studi kasus merupakan jenis pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sebuah peristiwa atau masalah dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang relevan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah solusi atau jawaban atas peristiwa yang terjadi. Studi kasus penelitian ini adalah Politisasi Isu Pribumi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui *Facebook*.

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber datanya berasal dari data-data kepustakaan. Data tersebut dikumpulkan dengan cara mencari, memilih, menyajikan dan menganalisis data-data literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini adalah berita online dari media bereputasi dan kredibel juga pada pada laman Grup *Facebook* pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini yaitu data dari jurnal - jurnal, buku – buku ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

Tabel 1.3 Sumber Data

Cagub & Cawagub	Facebook
Basuki T Purnama & Djarot Saifull Hidayat	AhokDjarot
Anies Baswedan & Sandiaga Uno	SuaraAnies

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber terpercaya, terutama dari media elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Secara spesifik, penelitian ini akan fokus dan berkonsentrasi pada berita yang terkait dengan politisasi Isu Pribumi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 di media sosial bereputasi dan kredibel seperti detiknews.com, tempo.com, merdeka.com, republika.co.id, Geotimes.com dan kompas.com.

4. Teknik Analisis Data

Dalam proses menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, dijabarkan dengan bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan

berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Moleong, 2010: 208).

- a) Reduksi data: Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b) Penyajian data: penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
- c) Kesimpulan: Ini adalah ahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan.

5. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan secara sistematis dan konsisten dan dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam penelitian skripsi, maka penulis menulis menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab I

Terdiri dari Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II

Gambaran Umum, yang memaparkan secara singkat profil dan informasi yang mendasar tentang obyek penelitian yaitu pada Pilkada di DKI Jakarta.

Bab III

Hasil dari Pembahasan yang akan menguraikan hasil dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian tentang Politisasi Isu Pribumi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di Media Sosial : Analisis antara kubu Ahok dan Anies, kemudian hasil tersebut dianalisis dan dijabarkan.

Bab IV

Penutup menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

Daftar Pustaka